

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS)



**OLEH :
RIFKIATY RARA KAMASE
NIM B 111 12 069**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh

RIFKIATY RARA KAMASE

NIM B 111 12 069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus 637/Pid.B/2015/PN.Mks)

disusun dan diajukan oleh

RIFKIATY RARA KAMASE

B 111 12 069

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 4 Maret 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswi :

Nama : RIFKIATY RARA KAMASE

Nomor pokok : B 111 12 069

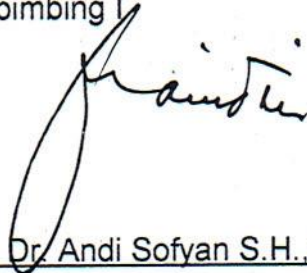
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus
Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Februari 2016

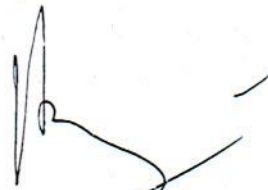
Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.H.

NIP. 1962 0105 1986 011 001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.

NIP. 196 80125 199702 2001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

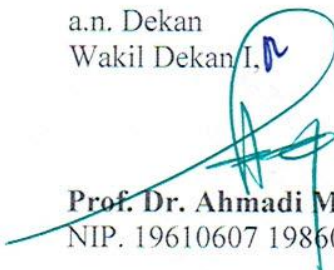
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RIFKIATY RARA KAMASE**
No. Pokok : B111 12 069
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri
Sendiri (Studi Kasus Putusan
No.637/Pid.B/2015/PN.Mkss)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I.


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

RIFKIATY RARA KAMASE (B 111 12 069). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (*Studi Kasus No.637/Pid.B/PN.Mks*)”. dibawah bimbingan Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder. Data (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap, sehingga diperoleh jawaban sebagai kesimpulan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) dalam Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum. yakni, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki, dan menurut penulis penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 2) dalam Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 127 karena unsur-unsurnya tidak terbukti dan tidak saling mencocoki, Majelis Hakim keliru dalam mengambil keputusan tanpa melihat Pasal 54, 55 dan 103 UUD RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian, terkait dengan pemidanaan bagi terdakwa baik sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi yang bersifat komplementer.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (studi kasusputusanomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks)

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terkhusus kepada orang tua yang telah melahirkan penulis, kepada tante dan nenek yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku atas kepercayaan dan dukungan kalian untuk penulis selama menempuh pendidikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ketua bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. dan Sekretaris bagian Bapak Amir Ilyas S.H.,M.H.;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku pembimbing II. Terima

kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan kepada penulis;

5. Bapak Prof. Dr. H.Muh. Said Karim, S.H.,M.H.M.Si , Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H., dan Bapak Abdul Asis, S.H.,M.H.sebagai penguji Ujian Skripsi penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh pegawai/staf Akademik serta yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;
7. Bapak Mustari, S.H. serta pegawai/ staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah penulis repotkan selama proses pra penelitian dan proses penelitian berlangsung;
8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, terima kasih telah memberi waktu dan tempat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Teman-teman Angkatan 2012 (PETITUM) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman
10. Terima kasih untuk Bima Zahara, Swanzay, kak edo, mama dede, pak minggu yang sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
11. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 90 Unhas khususnya desa Leppangang Kec. Patampanua Kab. Pinrang, terima kasih atas persaudaraan, kebersamaan dan kerjasamanya.

Dengan segala perbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak yang berminat terhadap karya ini.

Makassar, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Narkoba	13
1. Jenis-Jenis Narkoba	14
2. Penyalahgunaan Narkotika	22
3. Ketentuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	24
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman	27
1. Pertimbangan Yuridis	27
2. Pertimbangan Sosiologis	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	33
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks)	33
1. Identitas Para Pihak	33
2. Posisi Kasus	34
3. Dakwaan Penuntut Umum	36
4. Tuntutan Penuntut Umum	41
5. AnalisaPenulis	42
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks)	49
1. Pertimbangan Hakim	49
2. Amar Putusan	54
3. AnalisaPenulis	54

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin bermacam-macam.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan

¹Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013. Di tahun 2014 jumlah penyalahguna narkoba di negeri ini telah menyentuh angka 4.022.702 orang ini artinya 2,18% dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 184.175.500 jiwa.

Fakta diatas didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.²

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

²BNN (2014), Jurnal Data 2014.(www.bnn.go.id)

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Tindakan rehabilitasi oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan

narkotika”. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:³

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II;
 - c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi

barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hamper setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di siding pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendeskripsikan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks.
2. Tujuan Subjektif
 1. Untuk memperoleh bahan utama dalam penyusunan skripsi.
 2. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis.

D. Manfaat Penelitian

Didalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang-undangan tentang narkoba agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Manfaat dalam ilmu teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

2. Manfaat dalam praktis

- a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah narkoba.
- b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" , sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit* " itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum."⁴

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

⁴P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”⁵

Lebih lanjut, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang maksudnya “tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum” .

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

⁵Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya 11 unsur yaitu:⁶

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁷

- a. Sifat melawan hukum umum
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- b. Sifat melawan hukum khusus
Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

⁶Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 82

⁷I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.57

- c. Sifat melawan hukum formal
Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d. Sifat melawan hukum materiil
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

B. Narkoba

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.

Narkoba merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

1. Jenis-Jenis Narkoba

A. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:⁸

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:⁹

a. Candu

⁸Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁹Maradani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional(Jakarta,2008),Hlm.81-86.

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "*Lates*". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;

c. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu;

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam

bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan;

e. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah *pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna;

f. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.

B. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut

psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997, Antara lain:¹⁰

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Berikut ini adalah jenis-jenis dari psikotropika:¹¹

a. Ecstasy

¹⁰Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

¹¹Mardani Op.cit. Hlm. 86-88.

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum, Efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang;

b. Shabu-Shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

C. Zat Adiktif Lainnya

Adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Bahan berbahaya ini adalah zat adiktif yang bukan Narkotika dan Psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan.

a. Minuman Keras

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung Alkohol tetapi bukan obat. Minuman keras terbagi dalam 3 golongan yaitu:

1. Golongan A berkadar Alkohol 01%-05%
2. Golongan B berkadar Alkohol 05%-20%
3. Golongan C berkadar Alkohol 20%-50%

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang mengandung di dalamnya:

1. Bir, Green Sand 1%-5%
2. Martini, Wine (Anggur) 5%-20%
3. Whisky, Brandy 20%-55%

b. Nikotin

Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti Kokain dan Heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok, cerutu, dan pipa. Tembakau juga dapat digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau tanpa asap). Walaupun kampanye tentang bahaya merokok sudah menyebutkan betapa berbahayanya merokok bagi kesehatan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang yang terus merokok. Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif dari nikotin adalah sangat kuat.

c. Volatile Solvent

Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Cara penggunaan seperti ini disebut inhalasi. Zat adiktif ini antara lain: Lem UHU, Campur Pencampur Tip Ex (Thinner), Aceton untuk pembersih warna kuku, Cat tembok, Aica Aibon, Castol, dll.

d. Inhalansia

Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu banyak ditemukan digunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Contoh spesifik dari inhalan adalah bensin, vernis, cairan pemantik api, lem,

semen karet, cairan pembersih, cat semprot, semir sepatu, cairan koreksi mesin tik (tip-ex), perekat kayu, bahan pembakaran *aerosol*, pengencer cat. Inhalan biasanya dilepaskan kedalam paru-paru dengan menggunakan suatu tabung.¹²

Apabila dilihat dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.
- 2) Stimulant, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dan

¹²Ibid. Hlm 88-89.

kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Saat sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang. Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

palinh singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas.

3. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun beberapa ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman batangnya lebih 1 (satu) kilogram atau lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur

tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.¹³

2. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

¹³<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>

3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penetapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan, untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

1. Data primer yaitu, data asli yang diperoleh melalui studi lapangan, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain, untuk mendapatkan data

langsung dari responden yang objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Majelis Hakim Putusan Perkara 637/Pid.B/2015/PN.Mks;
- b. Mahasiswa (i) yang cakap hukum;

2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menelaah literatur, artikel, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta buku-buku tentang narkoba.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap pecandu narkoba serta bahan-bahan normatif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten.

D. Analisi Data

Seluruh data yang akan diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif, Secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat.

Menurut penulis penyebab utama orang ketergantungan narkoba karena ketidaktahuan akan bahaya yang ditimbulkan barang tersebut. Sehingga mengakibatkan sulit kembali kepada jati diri yang sebenarnya. Faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan Narkoba, yaitu : Dasar agama tidak kuat; Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat jarang, tidak mau tahu; Pergaulan dalam lingkungan sekolah;

Pengaruh masyarakat lingkungan; Budaya yang masuk melalui elektronik dan media cetak.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

- 1) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik:
 - a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi;
 - b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah;
 - c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim;
 - d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru;
 - e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur;
 - f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual;
 - g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid);
 - h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah

tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya;

- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- 2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis:
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah;
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 3) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social:
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan;
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga;
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram;
 - d. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

Pembahasan umum dalam studi kasus perkara putusan No.

637/Pid.B/2015/PN.Mks. yakni :

Hukum pidana materiil (hukum pidana substantive) adalah seluruh peraturan yang memuat peremusan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana, siapa yang dapat dipidana, mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana, dan pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Hukum pidana formiil (hukum pidana ajektif) atau dapat disebut Hukum Acara Pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara Negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dan diluar

KUHP yaitu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Tujuan pemidanaan yaitu suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan, dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.

Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Dakwaan dalam kasus perkara ini adalah surat dakwaan alternative yaitu, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan antara kejahatan yang satu dan kejahatan lainnya. Menurut penulis dakwaan jenis ini memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana.

B. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks

1. Identitas Para Pihak

- a. Identitas Terdakwa : Dandy Setiawan Bin Kadari, Umur 22 Tahun, Lahir di Enrekang pada tanggal 01 September 1993, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat Jln. Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar.
- b. Identitas saksi I : Ferdiansyah, umur 30 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 15 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, alamat jalan Jend. Ujung pandang no. 12 kota Makassar.

- c. Identitas saksi II : Haski Jaya Hasnun, umur 26 tahun, lahir di Jenepono pada tanggal 29 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, alamat Jalan Ujung Pandang no. 12 Kota Makassar.

2. Posisi Kasus

Pada awalnya bahwa terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI, pada hari jumat 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.99 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan maret 2015, bertempat di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Sdr. DANDY SETIAWAN Bin KADARI karena telah ditemukan sedang membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Berawal pada saat terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mendatangi BIMA (DPO) di Jalan Skarda Kota

Makassar dan membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah kos terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang telah terdakwa beli tersebut namun pada saat terdakwa berada di depan kamar kos tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yang sementara melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Skarda Lrg. 50 Kota Makassar tersebut, dimana pada saat diamankan terdakwa telah ditemukan barang bukti yang tersimpan ditangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan guna diproses lebih lanjut.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri putusan nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks yang dilakukan oleh terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dakwaan Pertama:

Bahwa terdakwa Dandy Setiawan Bin Kadari, pada hari Jumat 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mendatangi BIMA (DPO) di Jalan Skarda Kota Makassar dan membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah kos terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang telah terdakwa beli tersebut namun pada saat terdakwa berada di depan kamar kos tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yang sementara melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 653/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto, selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0314$ gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisanya berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0255 gram milik terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dakwaan kedua:

Bahwa terdakwa DANDY SETIAWAN BIN KADARI, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Skarda Lrg. 50 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu berupa alat penghisap (bong), setelah itu shabu-shabu dimasukkan kedalam pirex kaca yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian pirex kaca yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dari bawahnya dengan menggunakan korek api gas dan setelah shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap maka asapnya terdakwa isap dengan menggunakan bong penghisap masuk ke dalam mulut kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut terdakwa gunakan secara berulang-ulang dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu maka terdakwa merasakan perasaanya menjadi tenang dan segar.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizing dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 653/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangahi oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu :

A. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi Ferdiansyah (Anggota Polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi menerangkan bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita tepatnya di Jalan Skarda N Lrg.50 Kota Makassar;
- b. Saksi jelaskan sehingga saksi bersama dengan Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar yaitu untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga pada waktu itu saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan saat itu saksi bersama dengan Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengamankan terdakwa sedang jalan kaki dengan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan;
- c. Bahwa saksi mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) saset berisi Kristal bening diduga shabu dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut;
- d. Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa sudah sepuluh kali membeli dari BIMA dan terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 di dalam kamar kos terdakwa dan terdakwa melakukan

penyalahgunaan narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang.

2. Saksi Haski Hasnun (Anggota Polri), dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi menerangkan bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita tepatnya di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar;
- b. Saksi jelaskan sehingga saksi bersama dengan Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar yaitu untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga pada waktu itu saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan saat itu saksi bersama dengan Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengamankan terdakwa sedang jalan kaki dengan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan;
- c. Bahwa saksi mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) saset berisi Kristal bening diduga shabu dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan guna proses lebih lanjut;
- d. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dari BIMA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa gunakan.
- e. Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa sudah sepuluh kali membeli dari BIMS dan terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 di dalam kamar kos terdakwa dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang.

B. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB: 653/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Lab. Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal bening seberat 0,0314 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung methanfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa DANDY SETIAWAN K. BIN KADARI, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar;
- b. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Pelabuhan ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang digenggam terdakwa pada tangan kanan terdakwa;
- c. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri di rumah terdakwa di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar untuk terdakwa gunakan sendiri;
- d. Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada hari senin tanggal 2 maret 2015 di rumah kost terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan alat berupa bong kemudian terdakwa memasukkan paket shabu-shabu ke dalam pirex kemudian terdakwa bakar paket shabu-shabu yang telah tersimpan di dalam pirex kemudian asapnya dihisap secara berulang, setelah menggunakan shabu-shabu terdakwa merasa tenang dan segar;
- e. Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ketika berada di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar pada saat terdakwa berjalan kaki dan ditemukan 1 (satu) saset Kristal bening berupa shabu dari tangan kanan

- terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas guna diproses lebih lanjut;
- f. Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu terdakwa tidak dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang.

D. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus plastik bening dengan berat awal 0,0314 gram dan berat terakhir 0,0255 gram.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus plastik bening dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0255 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisa Kasus

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana yang menjadi terdakwa adalah DANDY SETAWAN Bin KADARI seseorang mahasiswa yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

A. Penerapan hukum pidana materiil dalam ditangkupnya terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI di Jalan Skarda N Lrg. 50 Kota Makassar di depan kamar kost terdakwa, sebagaimana menurut Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, maka unsur-unsur tertangkap tangan sebagai berikut:

1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap;
2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana;
3. segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu, segera berarti bahwa jarak antara terjadi tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa tersangka adalah pelakunya;
4. sesaat kemudian diserukannya/diteriakkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut;
5. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

Setelah ditangkapnya terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI kemudian terdakwa ditindak lanjuti dan di amankan

sebagai tindakan permulaan yaitu penangkapan yang kurang lebih 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang (3x24 jam), berdasarkan Pasal 17 KUHAP, berbunyi “seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, berbunyi “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

Penangkapan dalam perkara diatas dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 dan berlaku hingga 15 Maret 2015. Prosedur dan tata cara pelaksanaan penangkapan menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan maka perlu diperhatikan adalah:

- (1) pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat pemerintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pada hari Sabtu 14 Maret 2015 terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Pelabuhan Makassar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 02 April 2015 dan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April s/d 12 Mei 2015, berdasarkan Pasal 24 KUHP ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, dalam proses penahanan tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, akan merusak/menghilangkan barang bukti dan akan melakukan lagi tindak pidana.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan, peradilan berupa penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan Pasal 40 KUHP, berbunyi

“dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0314 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral dengan label barang bukti yang berisikan urine terdakwa. Hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :653/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan Kristal bening itu positif (+) mengandung narkotika dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine positif (+) mengandung *Metamfetamina*.

B. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara di atas, terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari uraian dakwaan alternatif tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

A. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa DANDY SETIAWAN BIN KADARI yang membenarkan

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekitar 18.00 wita bertempat di Jalan Skarda N Lrg.50 Kota Makassar tepatnya di depan kamar kost terdakwa, Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Skarda Lrg.50 Makassar tersebut dan sekitarnya merak terjadi penyalahgunaan narkotika dan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) saset shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi di dalam kamar kost tersebut, namun belum sempat terdakwa gunakan terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar.

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di dalam kamar kost terdakwa dengan cara menyiapkan sebuah bong yang terbuat dari botol mineral dan yang diisi air dan tutupnya mempunyai dua lubang sebagai tempat selang yang mana selang terbuat dari pipet yang dimasukkan ke dalam botol berisi

air, ujung pipet yang satu digunakan untuk menghisap sedangkan ujung pipet yang lain berfungsi sebagai tempat untuk menghisap shabu yang sudah diletakkan di pipet yang satu di bakar dengan korek gas sehingga mengeluarkan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa badan terdakwa menjadi tenang dan segar.

Bahwa terdakwa sudah beberap kali mengkonsumsi shabu-shabu sebelum diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 653/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan urine an. DANDY SETIAWAN K BIN KADARI adalah positif mengandung *methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana perbuatan terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks)

1. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti (fakta persidangan) yang ada dalam persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya

memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan: kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- b. Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni saksi ferdiansyah dan saksi hasnun sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan;
- c. Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- d. Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;
- e. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
- f. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

- g. Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;
- h. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- i. Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;
- 2) Perbuatan terdakwa merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
- 3) Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 2) Terdakwa sopan dalam persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya majelis hakim tidak mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum. Sesuai dengan wawancara penulis terhadap majelis yang memutus perkara tersebut IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H. (wawancara tanggal Januari 2016) mengatakan :

“bahwa dalam memutuskan perkara sebaiknya memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan bagaiman tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak merugikan masyarakat umum atau tidak, terdakwa hanya dikatagorikan sebagai pemakai narkotika, karena hanya memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ± 0,0314 gram, dalam perkara ini hakim menjatuhkan Pasal 127 dalam dakwaan kedua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhadap terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI”.

Setelah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I maka majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan pembeda.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalan oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim bermusyawarah maka diambilah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan amar putusan nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks.

A. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan terdakwa DANDY SETIAWAN BIN KADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus plastik bening dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0255 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membenani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dilihat dari penjelasan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Adapun, majelis hakim mempertimbangkan isi dari Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Menurut penulis majelis hakim menjatuhkan pasal 127 dalam perkara ini, hakim memperhatikan pengertian penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 yaitu “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum disini yaitu tidak adanya izin atau izin khusus dari pihak yang berwenang. Jadi tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai termasuk dalam Pasal 127 dikarenakan arti dari kata penyalahgunaitu sendiri.

Adapun unsur-unsur pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 “setiap penyalahguna narkotika

golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Sebagai berikut:

Penyalah guna : barang siapa yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur barang siapa:

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukkan kepada terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI yang dipersidangkan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan yang

diikutinya bersedia untuk mengikuti persidangan. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri:

tentang unsur “tanpa hak” ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang untuk itu, sedangkan “tanpa hak atau melawan hukum” berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut, yakni terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdakwa mengakui dalam persidangan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 kali.

Menurut penulis, dari pertimbangan hakim diatas, penulis tidak sependapat dengan hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara ini dengan melihat pada fakta persidangan saja.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan

setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 tahun 2009. Dalam hal ini, penulis menganalisis Pasal 127 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) A. setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotik, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kita hubungkan dengan Pasal 54 yang berbunyi :

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Penjelasan : yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 berbunyi :

- (1) orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sudah jelas dalam setiap pasal diatas menjelaskan bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dihubungkan dengan ayat 2, 3 dan dihubungkan lagi dengan Pasal 54, Pasal 55 dan 103 setiap penyalahguna yang dimaksud diatas yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum disini yaitu orang yang mengkonsumsi narkoba atau menggunakan narkoba, memakai narkoba atau pecandu narkoba bukan untuk pengobatan dan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menurut penulis dalam perkara ini majelis hakim lebih berpatokan dalam fakta persidangan, majelis hakim tidak memperhatikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dalam fakta persidangan terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dia dapat dari BIMA (DPO) pada hari Jumat 13 Maret 2015 sekitar jam 18.00 wita shabu-shabu tersebut untuk di gunakan sendiri di kost. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: 653/NNF/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI hasilnya mengandung narkoba. Terdakwa mengakui telah menggunakan sebanyak 10 kali, apabila seseorang yang menggunakan narkoba sebanyak itu maka dapat dipastikan bahwa akan adanya timbul rasa ketergantungan tetapi pemakai atau penyalahguna narkoba masih dapat mengontrol untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Jadi dalam hal ini pernyataan yang dikemukakan oleh terdakwa berdasarkan pertanyaan hakim dalam persidangan yang

menyatakan bahwa terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Dalam putusan Nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, menurut penulis majelis hakim dalam menerapkan Pasal 127 karena unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, dalam perkara ini yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Tetapi majelis hakim keliru dalam memutuskan terdakwa DANDY SETIAWAN Bin KADARI yang tidak memutuskan tindakan lanjut setelah terdakwa melakukan pidana penjara yaitu untuk melakukan atau memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling tidak mencocoki dan menurut penulis penerapan hukum materiil dalam kasus ini tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan hakim dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dalam perkara ini, dalam hal lain majelis hakim telah keliru tanpa mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) dengan menyambungkan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 bahwa majelis hakim memutuskan tindakan lanjut

setelah tindakan pidana penjara untuk memutus atau memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di institusi rehabilitasi yang ada di Makassar.

B. Saran

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan menghimbau kepada remaja, mahasiswa(i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga tidak adanya muncul penyalahguna baru, dan peyalahguna yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (Institusi Pecandu Wajib Lapor) untuk mendapatkan penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,

Andi Sofyan, 2012, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education,

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska,

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta, Nuha Medika,

Laksana P, 2004, *Perubahan Sikap dan Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang, Bengawan Ilmu,

Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers,

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adya Bakti,

Rocky Marbun, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Transmedia Pustaka

Taufik Makaro dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Pidana (KUHP)

Internet :

BNN (2014), Jurnal Data 2014.(www.bnn.go.id)

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>